

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengajukan judul "PENINGKATAN KONSUMSI MINYAK CHINA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONALNYA". Penulis memperhatikan bahwa dalam strategi globalnya, China menerapkan kebijakan politik luar negerinya dengan ciri khas yaitu tidak mengekor pihak lain dan selalu mendasarkan perilaku politik luar negerinya pada kepentingan nasionalnya pada saat itu.

Keberadaan negara China yang dahulu tidak diperhitungkan, dewasa ini mulai menjadi pusat perhatian di kawasan Asia, bahkan di dunia sekalipun. Bangkitnya China tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah barang-barang komoditi yang berasal dari negara tersebut, melainkan juga meningkatnya konsumsi energi, khususnya minyak, di dalam negeri.

Dalam dua dekade mendatang, konsumsi minyak China diharapkan tumbuh pada rata-rata 7,5% pertahun. Ini akan menjadi strategi yang memaksa negara China untuk mengamankan aksesnya memperoleh minyak di dalam maupun di luar negaranya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis dan meneliti kepentingan nasional China untuk mendapatkan minyak

B. Tujuan Penulisan

Kegiatan penulisan ini dimaksudkan untuk:

1. Mengkaji atau memahami bagaimana kebijakan luar negeri China dijalankan/diterapkan sehubungan dengan permintaan konsumsi minyak di dalam negeri China.
2. Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini telah dipelajari serta menjadi perhatian mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
3. Sebisa mungkin penulis berusaha menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi Universitas dimana penulis menimba ilmu. Salah satunya adalah dengan mengadakan penelitian ini, dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat bagi teman-teman/adik-adik mahasiswa sebagai tambahan wawasan dan pengetahuannya.

C. Latar Belakang Masalah

Republik Rakyat Tiongkok, atau Republik Rakyat China (RRC) adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai China/Tiongkok.

Sejak didirikan pada 1 Oktober 1949, RRC dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). RRC (China) adalah negara terpadat di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 miliar jiwa yang mayoritas merupakan suku bangsa Han

China juga merupakan negara terbesar di Asia Timur, dan keempat terluas di dunia, setelah Rusia, Canada, dan Amerika Serikat. RRC berbatasan dengan 14 negara, yakni Afghanistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Vietnam.¹

Selama dekade 60-an hingga 70-an, negara China yang revolusioner, miskin, dan kacau (*chaotic*) dipandang sebagai suatu ancaman bagi kawasan-kawasan lain serta bagi perdamaian dunia. Akan tetapi sejak diberlakukannya reformasi pasar (*market reform*) dan kebijakan “pintu terbuka” (*Open Door Policy*) terhadap kaum kapitalis dan imperialis, negara China secara radikal telah merubah kesan agresifnya.

China dalam perkembangannya selalu menjadi perhatian dunia, baik perkembangan domestik maupun tingkah laku politik luar negerinya. Dalam dekade 1990-an ini, China dihadapkan pada tantangan baru sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan minyak, tidak mengherankan kalau para pemimpin China sekarang melakukan pemikiran ulang terhadap strategi politik luar negeri mereka sekarang ini.

Peningkatan akan kebutuhan minyak tersebut memiliki implikasi terhadap politik luar negeri China. Akses Beijing untuk sumber daya dari luar negeri adalah penting untuk pertumbuhan kelanjutan ekonomi, dan karena pertumbuhan adalah dasar stabilitas sosial China untuk kelangsungan hidup PKC. Sejak China meninggalkan sentralisasi ekonomi yang dikendalikan pemerintah, Beijing berkemampuan untuk menyesuaikan politik luar negerinya dengan strategi

pembangunan dalam negerinya. Institusi-institusi lama, seperti Foreign Affairs Leading Small Group di PKC, masih membuat keputusan kunci, akan tetapi lingkungan yang plural telah tampil ke depan dan mempersilahkan pemimpin-pemimpin bisnis, akademisi, militer, dan Pemerintah untuk membantu membentuk politik luar negeri.

China sendiri saat ini merupakan produsen minyak kelima terbesar di dunia. Negara China menguasai sekitar 2,3% cadangan minyak dunia, dengan cadangan terbukti 24 miliar barel. Meskipun jauh lebih besar dibandingkan cadangan yang dimiliki Indonesia, cadangan sebesar itu sangat kecil bagi China dengan penduduk 22% dari total penduduk dunia.

Lapangan-lapangan minyak besar di China bagian selatan, yang menyumbang sekitar 90% produksi, saat ini telah mencapai puncak produksi dan mulai menurun. Upaya mengembangkan cadangan baru di lepas pantai dan di daerah lain juga mengecewakan. China menjadi importir neto minyak sejak November 1993.

Antara peningkatan ekonomi dan persediaan sumber energi (minyak, batubara, maupun energi yang lain) di suatu negara memang dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang berkebalikan. Di satu sisi, peningkatan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat negara tersebut. Tapi, di sisi lain menambah beban bagi ketersediaan sumber energi minyak maupun batubara yang semakin hari semakin terbatas.

Untuk menutup kekurangan pasokan dalam negeri, China pun kini

minyak mentah nasional sebesar 200 juta ton tahun 2000, sekitar 70 juta ton harus ditutup dari impor. Dari 70 juta ton minyak mentah tersebut, lebih dari 50 juta ton diantaranya berasal dari Timteng.

Padahal sejak bulan Juni lalu, harga minyak dunia terus merangkak naik hingga menembus US\$60/barel. Puncaknya terjadi ketika badai Katrina menghantam Amerika Serikat pada tanggal 29 Agustus 2005 lalu. Akibat badai yang melanda wilayah New Orleans, AS, itu sempat membuat harga minyak dunia menyentuh US\$ 70,85/barel. Hal tersebut dikarenakan badai tersebut merusak pipa dan kilang minyak di wilayah Teluk Meksiko. Badai Katrina ini juga diperkirakan menyedot produksi minyak dunia sebanyak 55 juta barel hingga akhir tahun nanti. Jumlah ini sama dengan badai Ivan pada 2004 yang lalu.

Peningkatan kebutuhan itu, sesuai hukum ekonomi, berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia. Beberapa negara berkembang di Asia kelabakan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India harus menambah subsidi minyak sehingga otomatis akan menambah beban negara.²

China sekarang ini sudah menggeser Amerika Serikat sebagai konsumen terbesar dunia untuk beberapa produk pangan, komoditas industri, kehutanan, dan tambang, termasuk komoditas energi (kecuali minyak). Untuk baja misalnya, konsumsi China (258 juta ton) sudah dua kali lipat dari Amerika Serikat (104 juta ton) pada tahun 2003. Untuk batubara, konsumsi China sebesar 800 juta ton, sementara Amerika Serikat hanya 574 juta ton.

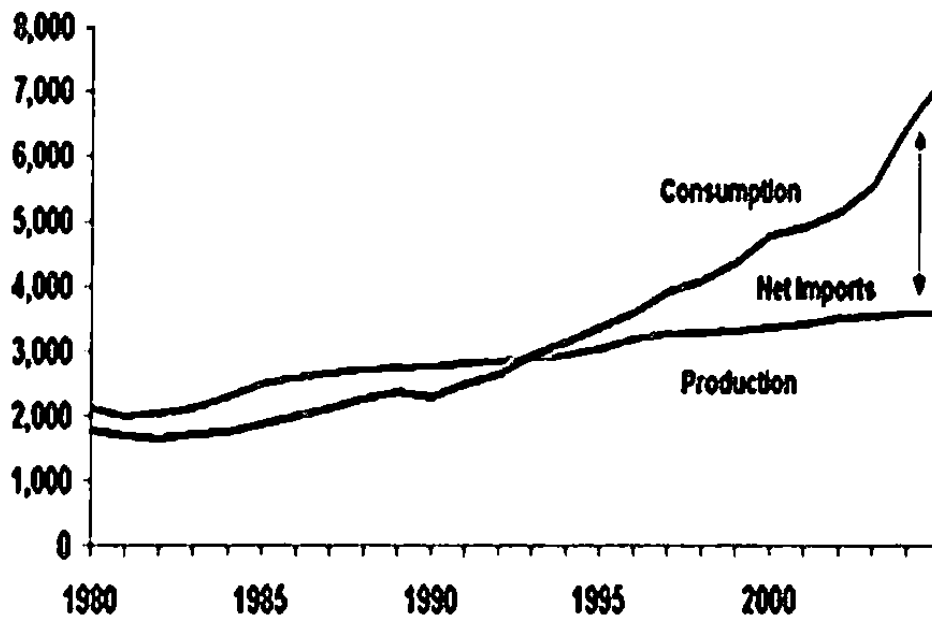
² <http://www.iswara.co.id/index.php?cat=detail&id=198670> diakses 11/10/2007

Untuk energi, China saat ini merupakan konsumen ketiga terbesar dunia setelah Amerika Serikat dan Jepang. Untuk minyak, China bahkan sudah menyalip Jepang tahun 2002 lalu, dan kini urutan kedua setelah Amerika Serikat. Konsumsi minyak Amerika Serikat saat ini memang masih jauh lebih besar dibandingkan dengan China, yakni 20,4 juta barel per hari berbanding 6,5 juta barel per hari pada tahun 2004.

Namun, China diperkirakan segera menyalip Amerika Serikat, mengingat pertumbuhan konsumsi China yang jauh lebih cepat. Konsumsi minyak Amerika Serikat hanya naik 15% pada kurun waktu 1994-2004, sedangkan di China naik lebih dari dua kali lipat pada kurun waktu yang sama. Konsumsi minyak China meningkat dari 4,36 juta barel per hari (tahun 1999) menjadi 4,7 juta barel per hari (tahun 2000), lalu 4,9 juta barel per hari (tahun 2001), kemudian 6,5 juta barel per hari (tahun 2004), dan diperkirakan akan membengkak lagi menjadi 10,5 juta barel per hari pada tahun 2020 nanti. Sekitar 69% kenaikan permintaan minyak dunia tahun 2002 adalah karena kenaikan permintaan minyak China. Untuk konsumsi energi secara keseluruhan, China diperkirakan menyalip Jepang dalam satu dekade mendatang.³

³ http://www.kompas.com/kompas_cetak/0508/20/Ekonomi/1084800.htm

Tabel 1.1
 Grafik Produksi dan Konsumsi Minyak China
 pada tahun 1980- 2005
 (dalam ribuan barel per hari)



sumber: <http://www.eia.doe.gov/emeu/international/china.html>

Sebelum tahun 1993, jumlah produksi minyak dalam negeri China masih berada di atas jumlah konsumsi minyaknya, sehingga China dapat memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Akan tetapi setelah tahun 1993, jumlah konsumsi minyak mengalami peningkatan drastis bahkan sampai melewati jumlah produksi minyak dalam negeri, sehingga untuk menutupi kebutuhan minyaknya, China banyak mengimpor minyak dari beberapa negara tetangga (lihat tabel 1.1)

D. Pokok Permasalahan

Dengan melihat uraian latar belakang tersebut diatas dan dengan memperhatikan kejadian-kejadian yang mengikutinya, maka penulis mengambil pokok masalah, yaitu:

“Bagaimana pengaruh peningkatan konsumsi minyak China terhadap politik luar negerinya?”

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam hubungan internasional kita memerlukan teori, yaitu bentuk penjelasan paling umum yang memberi tahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga bakal terjadi. Jadi, selain sebagai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi.⁴

Teori juga berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, maka fenomena-fenomenanya serta data-data yang ada akan sulit dimengerti dan dipahami, di sisi lain teori juga dapat berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁵

⁴ Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta, 1990. hal.217

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, maka konsep dan teori yang akan digunakan adalah Konsep Kepentingan Nasional, Teori Politik Luar Negeri, dan Teori Manajemen Konflik.

I. Konsep Kepentingan Nasional

Pertama, penulis akan menggunakan Konsep Kepentingan Nasional. Pada dasarnya, tujuan nasional yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan didasarkan pada kepentingan-kepentingan negaranya, yang disebut kepentingan nasional. Negara menetapkan kepentingan-kepentingan nasionalnya dan juga menentukan cara bagaimana kepentingan tersebut dicapai. Metode-metode dan tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencoba mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan nasional.

Dalam mendapatkan dan sekaligus memenuhi kebutuhan minyak yang saat ini jumlahnya makin meningkat di sektor rumah tangga dan sektor industri khususnya, China menerapkan beberapa strategi dimana strategi tersebut merupakan salah satu dari kebijakannya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yang mau tidak mau melibatkan hubungannya dengan negara lain.

Kepentingan nasional (*national interest*) dalam definisi ini diartikan sebagai rangkaian gagasan dari tujuan atau kebutuhan yang ditetapkan oleh para pembuat keputusan yang harus dijalankan ke dalam tindakan nyata oleh suatu bangsa demi keuntungan negara (bangsa) yang bersangkutan itu⁶.

Dalam konteks ini tujuan atau kebutuhan dapat berupa: cara bertahan hidup (*self preservation*), kebebasan dari campur tangan pihak lain (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan nasional (*military security*), dan peningkatan kesejahteraan rakyat (*economic well being*)⁷.

II. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dipahami sebagai strategi yang mendasari tindakan negara dalam hubungan dengan negara-negara lain untuk pencapaian kepentingan nasionalnya, dengan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.⁸ Pengertian serupa juga telah dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Ray Olton:

*"Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision maker of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest."*⁹

Strategi tersebut merupakan patokan dan menuntun perumusan kebijakan. Strategi adalah pola rencana jangka panjang, yang dipersiapkan berdasarkan perhitungan secara matang. Berpedoman pada strategi, para pembuat kebijakan berusaha mencapai serta mengejawantahkan kepentingan nasional. Dalam perspektif strategis, dasar pemikiran bagi kebijakan-kebijakan didasarkan pada penilaian variabel-variabel kunci pada saat

⁷ Plano, Jack C. dan Olton, Roy. op.cit., hal.9

kebijakan tersebut dibuat. Variabel-variabel kunci dalam pembentukan strategi tersebut adalah:

1. pihak-pihak dan persekutuan (*parties and alignment*)
2. penting tidaknya permasalahan (*stakes of the game*)
3. penilaian kapabilitas (*capability estimates*)
4. penilaian strategi pihak-pihak lain (*strategies of other parties*)
5. aturan permainan (*rules of the game*)

Kelima variabel kunci ini dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan dalam menetapkan strategi politik luar negeri yang akan dilaksanakan.¹⁰

Pada prinsipnya, Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam cara mengendalikan hubungan luar negeri sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kepentingan nasional yang dibebankan kepada negara itu oleh rakyatnya.¹¹

Hubungan antara perubahan dan politik luar negeri diklasifikasikan ke dalam empat bagian, yakni:

- 1) antara output politik luar negeri dan perubahan, dimana perilaku politik luar negeri menyebabkan perubahan pada lingkungan negara.
- 2) antara proses dan struktur politik luar negeri dan perubahan, dimana perubahan dalam struktur dan proses negara menentukan output politik luar negeri.

¹⁰ Rudy, Teuku. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa: Bandung, 1993. hal.65

- 3) antara perubahan dalam arti penting komponen-komponen sistem politik luar negeri dan output politik luar negeri, dimana perubahan dari bagian sistem akan merubah perilaku politik luar negeri.
- 4) antara perubahan input dari lingkungan dan output politik luar negeri, yang memfokuskan pada politik luar negeri sebagai suatu respon terhadap perubahan pada lingkungan negara.¹²

Interaksi antar negara memiliki dua karakteristik, yakni karakteristik yang pertama adalah karakteristik konflik, krisis, dan persaingan. Karakteristik yang kedua yaitu kerjasama.

Karakteristik yang pertama berbentuk suatu hubungan konflik yang mengandung kemungkinan kekerasan atau penggunaannya yang terorganisasi.

Konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisasi muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Para pihak dalam suatu konflik internasional, biasanya tetapi tidak mutlak, adalah pemerintah negara bangsa¹³. Para pihak berusaha mencapai tujuan tertentu, seperti akses mendapatkan sumber daya energi di suatu negara lain.

Konflik meliputi tindakan –ancaman dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda, komersial atau militer yang diambil oleh pihak

Karakteristik yang kedua berbentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian dan persetujuan yang saling memuaskan kedua belah pihak yang melakukannya.

III. Teori Manajemen Konflik

Tiga faktor utama yang dapat membuat pelaku (baca: negara) tertarik untuk berpartisipasi langsung dalam program pencegahan atau penyelesaian konflik adalah:

- 1) Tingkat resiko politik maupun ekonominya.
- 2) Seberapa besar pelaku tersebut memerlukan akses untuk sumber daya dan pasar yang terletak di daerah konflik itu.
- 3) Seberapa penting reputasi sebagai aset pelaku.¹⁴

Kebijakan luar negeri akan sulit dipaksakan bersinergi dengan manajemen konflik yang kurang baik. Sinergi bisa berlangsung di antara manajemen konflik secara profesional dan rasional dengan kebijakan luar negeri yang profesional dan rasional pula. Sinergi yang baik dan selaras mulai dimungkinkan oleh proses demokratisasi, iklim keterbukaan, tuntutan, dan harapan menuju *good governance*.

Yang perlu ditanggulangi adalah akar permasalahan yang melandasi perkembangan konflik itu dan bukan hanya dengan menyingkirkan pelaku konflik. Manajemen konflik yang mencari serta melaksanakan upaya pemecahan masalah secara komprehensif, setara, dan

¹⁴ Haufler, Virginia. *Is There a Role for Business in Conflict Management?*. in book *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*. United States Institutes of Peace Press: Washington DC, 2001

adil, bisa menurunkan derajat konflik dengan kekerasan ke konflik tanpa kekerasan, lalu ke persaingan sehat, dan kemudian menuju ke rekonsiliasi dan kerjasama.

Dalam pengaplikasian konsep kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempertahankan hidup (*self preservation*) tersebut, saat ini Pemerintah China kini mulai giat melakukan eksplorasi di negara-negara yang kaya akan minyak. Hal ini dikarenakan kemampuan China untuk memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri dibatasi oleh kenyataan bahwa kecilnya jumlah cadangan minyak yang terbukti tidak sebanding dengan tingginya tingkat konsumsi dan pesatnya pertumbuhan perekonomiannya yang sangat membutuhkan energi berupa minyak. Melihat kecepatan produksi saat ini, nampaknya produksi tersebut hanya bisa bertahan kurang dari 2 dekade. Harapan China pada pertumbuhan ketergantungan pada minyak impor di masa depan telah membawa China berusaha memperoleh kepentingannya (baca: minyak) lewat eksplorasi dan produksi minyak di beberapa negara, misalnya Kazakhstan, Rusia, Venezuela, Sudan, Afrika Barat, Iran, Arab Saudi, Kanada, dan Indonesia.¹⁵

Pemerintah China juga telah mengatur ulang aset-aset minyak dan gas milik negara untuk dikelola oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) dan China Petrochemical Corporation (Sinopec). Sebelum pengaturan tersebut, CNPC telah mengelola eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan Sinopec mengelola penyaringan dan distribusinya. Pengaturan ulang ini memfokuskan perusahaan-perusahaan tersebut, CNPC di daerah utara dan barat,

¹⁵ *China's Oil and Gas Strategy: The Sino-Saudi Connection*, *Geopolitics Magazine*, LA Times, LA

dan Sinopec di daerah selatan. Perusahaan besar China lainnya adalah China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), yang menangani eksplorasi dan produksi lepas pantai yang menghasilkan lebih dari 10% produksi minyak mentah dalam negeri China.

Untuk melaksanakan kebijakan luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan nasional dan mendukung tindakan yang diambil oleh suatu negara, diperlukan topangan kapabilitas. Kapabilitas dikerahkan untuk mengimplementasikan tujuan eksternal suatu negara yang pilihan tujuan (baca: mendapatkan sumber daya minyak) atau alat untuk mencapai tujuan tersebut terbatas, atau dianugerahi oleh kualitas dan kemampuan yang tersedia. Coulombis menginterpretasikan kapabilitas sebagai: atribut-atribut nyata dan tidak nyata dari negara-negara bangsa (atau aktor-aktor politik lainnya) yang memungkinkan aktor-aktor tersebut melaksanakan berbagai tindakan kekuasaannya dalam berhubungan dengan aktor-aktor lainnya.¹⁶

Di masa lalu, pada waktu Pemerintah (baca: China) belum mempunyai variasi instrumen kebijakan luar negeri seperti yang kini tersedia, Pemerintah tersebut sering harus mengandalkan penggunaan kekerasan dalam proses perundingan. Kekerasan dan paksaan bukan hanya taktik yang paling efisien, tetapi dalam banyak hal juga merupakan satu-satunya alat yang mungkin untuk mempengaruhi.

Sejak dicanangkannya program modernisasi empat (*Sige Xiandaihua*)

Pemerintah China menyadari bahwa hubungan antar negara sudah bergeser dari konfrontasi ke kerjasama. Pemerintah China menyadari bahwa keberhasilan program reformasi akan sangat ditentukan oleh lingkungan eksternal yang damai. Sementara itu, politik luar negeri independen merupakan instrumen yang digunakan oleh para pemimpin China untuk membangun kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka menciptakan lingkungan eksternal damai sebagai perangkat keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam negara.

Untuk itu, Pemerintah China dengan kebijakan politik luar negerinya, mulai giat menjalin dan bahkan membuka hubungan dengan negara-negara yang kaya akan sumber minyak di dunia, terutama dari kawasan Timur Tengah. Contohnya adalah CNOOC yang tiga tahun lalu telah menandatangani perjanjian untuk mengambil sejuta barel minyak per hari di Indonesia, dan dua tahun yang lalu perusahaan tersebut juga telah menandatangani kontrak besar untuk memproduksi gas di Australia.

Apabila China melakukan pendekatan yang bersifat menekan atau bahkan pendekatan dengan kekerasan terhadap negara-negara berkembang penghasil minyak yang akan menimbulkan konflik, maka hal tersebut akan mengakibatkan negara tersebut tingkat resiko politik dan resiko ekonomi yang tinggi. Resiko politiknya adalah China dapat kehilangan citra nama baik di dunia internasional, dan resiko ekonominya adalah China dapat dikenai sanksi embargo

Negara China juga mempertimbangkan pentingnya China memerlukan akses untuk sumber daya (khususnya minyak) dan pasar yang terletak di negara-negara berkembang penghasil minyak.

Disamping itu, China benar-benar menjaga reputasinya sebagai aset pelaku pencari sumber daya minyak. China tidak ingin penurunan atau bahkan kehilangan citra nama baik di mata negara-negara berkembang penghasil minyak tersebut. China tidak mau terseret dalam isu-isu politik kelas tinggi bersama dengan negara superpower, akan tetapi China lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang khususnya negara yang penghasil minyak.

China memperluas ekspansinya di kawasan Timur Tengah dengan cara meningkatkan hubungannya dengan negara-negara pemasok minyak, seperti Arab Saudi dan Iran, dengan menjual teknologi militer kepada mereka, menanamkan investasi di bidang industri dan prasarana energi. Saat ini, China mendapat 13,6% minyak impor dari Iran. Di bulan Maret 2004, China menandatangani perjanjian senilai US\$100 juta untuk investasi China di perusahaan minyak dan eksplorasi gas Iran.

China juga menjalin hubungan erat dengan Rusia. Rusia adalah pemasok minyak mentah terbesar kelima di China, dengan LuKoil menggantikan Yukos sebagai pemasok utamanya. China berharap dapat mengimpor kurang lebih 10

di tahun 2006. Dukungan China untuk Rusia di World Trade Organization (WTO) dan menumbuhkan perdagangan dan kerjasama China-Rusia.¹⁷

Pada Februari 2005, Presiden Hu mengunjungi Gabon untuk mengamankan persetujuan di Afrika. Pada Juni 2005, Presiden Hu juga memimpin delegasi dari industri gas alam ke negara Uzbekistan.

Politik kerjasama luar negeri yang kini dijalankan oleh China pada awalnya mau tidak mau harus menjalani tahap menjadi sahabat dahulu dengan negara-negara yang bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah baru mengarah ke kerjasama. Politik luar negeri yang bersahabat dan terbuka, seperti yang sedang dijalankan China tersebut kini telah terbukti berhasil mendekatkan China dengan negara-negara pemilik dan penghasil sumber daya energi minyak untuk mendapatkan dan mengamankan akses tersebut.

F. Hipotesa

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan permasalahannya juga dikaitkan dengan kerangka dasar teori yang digunakan penulis sebagai acuan pemecahannya, maka penulis menarik suatu hipotesa sebagai berikut:

Peningkatan konsumsi minyak China berpengaruh pada reorientasi politik luar negerinya terhadap negara-negara berkembang penghasil minyak.

G. Metodologi Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan data-data yang akurat dan dapat dipercaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (library research), oleh karena itu pengumpulan data diambil dari buku-buku literatur, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain (data sekunder).

H. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulisan memberi batasan atau jangkauan waktu penelitian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Namun hal-hal yang terjadi sebelumnya yang dianggap penting dan mendukung dalam penulisan ini

I. Sistematika Penelitian

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan diuraikan gambaran penulisan, yaitu mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, teknik pengumpulan data, dan jangkauan penelitian. Keseluruhan itu merupakan gambaran singkat dari isi skripsi.

Bab II : PEMERINTAH, INSTITUSI, DAN ORGANISASI URUSAN LUAR NEGERI CHINA

Dalam bab kedua ini akan digambarkan mengenai sistem pemerintahan China, dan juga institusi-institusi maupun organisasi-organisasi yang mengurus urusan luar negeri China.

Bab III : POLITIK LUAR NEGERI CHINA DAN PERAN PEMERINTAH CHINA DALAM PEREKONOMIAN

Dalam bab ketiga ini akan digambarkan kebijakan politik luar negeri China yang sudah terbuka sejak dicanangkannya *Gaige Kaifang* (reformasi dan politik membuka diri) sehingga menumbuhkan tingkat perekonomiannya, dan juga peranan Pemerintah China dalam membangun perekonomiannya itu.

Bab IV : POLITIK LUAR NEGERI CHINA PASCA KENAIKAN PERMINTAAN MINYAK DALAM NEGERI

Dalam bab keempat ini akan dijelaskan adanya peningkatan konsumsi minyak dalam negeri, penyebab kebijakan politik luar negeri Pemerintah

China, dan usaha China dalam menjalin hubungan dengan negara-negara penghasil minyak dalam usaha memperoleh, mempertahankan, dan memperluas akses minyak tersebut.

Bab V : KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab